



Perempuan di Garis Depan Krisis Ekologis:

FAMM Fest Hadirkan Suara, Seni, dan Perlawanan

Untuk segera disiarkan

Jakarta, 12 Desember 2025 - FAMM Indonesia bersama Kaoem Telapak telah mengadakan acara "FAMM Fest: mempertemukan SUARA, SENI, dan RASA " di Taman Ismail Marzuki, pada 10 Desember 2025 yang bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia . FAMM Fest merupakan sebuah *event* dalam rangka peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) lewat *One Day One Voices*. Kolaborasi ini dilakukan lintas isu dan juga berkolaborasi dengan para pegiat seni.

Tema tahun ini "Perempuan Melewati Batas untuk Kebebasan dan Demokrasi". Festival ini menyikapi ambisi besar negara untuk mengeruk sumber daya alam tanpa memperhatikan dampaknya bagi makhluk hidup. Beberapa tahun terakhir, Indonesia memasuki fase eksploitasi sumber daya alam yang paling agresif dalam dua dekade.

Perluasan perkebunan sawit, pertambangan nikel untuk industri baterai listrik, proyek food estate raksasa seperti di Merauke seluas 2,29 juta hektare, serta berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengabaikan daya dukung ekologis telah menyebabkan kerusakan serius pada tanah, hutan, sungai, dan kehidupan sosial masyarakat. Data deforestasi 2024 menunjukkan kerusakan signifikan, dengan catatan deforestasi netto 175,4 ribu hektare dari Kementerian Kehutanan dan 261.575 hektare dari Simontini, Kaoem Telapak mencatat hilangnya sekitar 3 juta hektare hutan akibat ekspansi sawit dalam dua dekade terakhir¹. Meski tren 10 tahun menunjukkan penurunan, lonjakan dalam beberapa tahun terakhir menegaskan bahwa proyek-proyek ekstraktif tetap menjadi pendorong utama hilangnya hutan dan meningkatnya kerentanan ekologis.

Hilirisasi dan proyek strategis nasional (PSN) telah memperburuk ketidakadilan gender, mulai dari hilangnya akses lahan yang memiskinkan perempuan dan memperbesar beban kerja, hingga krisis kesehatan akibat polusi industri yang meningkatkan penyakit pada ibu, bayi, dan anak serta menambah kerja reproduktif perempuan. Masuknya pekerja laki-laki dalam jumlah besar juga memicu risiko sosial seperti kekerasan berbasis gender, pelecehan, pernikahan anak, dan perdagangan manusia, sementara perempuan disabilitas dan ragam gender semakin terpinggirkan karena proses konsultasi publik yang tidak inklusif.

Ziadatunnisa, Juru Kampanye Kaoem Telapak menyebutkan bahwa Kaoem Telapak melakukan riset tentang kebun-kebun sawit di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Menurut Zia ekspansi dari industri ekstraktivisme ini memunculkan banyaknya pelanggaran HAM terhadap masyarakat yang terdampak, terutama Masyarakat Adat yang kerap menjadi korban.

¹ <https://kaoemtelapak.org/id/a-family-affair-dugaan-pelanggaran-terkait-deforestasi-korupsi-dan-hak-asasi-manusia-yang-terus-berlanjut-dalam-industri-perkebunan-kelapa-sawit-di-indonesia/>



“Salah satu poin penting yang kami awasi adalah perizinan, karena seringkali operasi sawit itu berjalan tanpa adanya izin seperti di Riau. Akibat dari rusaknya alam dari ekspansi sawit, berimbas pada perempuan-perempuan adat. Mereka mulai kesulitan melakukan tradisi-tradisi seperti ritual dan upacara adat, sehingga pengetahuan lokal ini terancam hilang. Belum lagi akses sumber daya alam (SDA) yang kian lenyap akibat polusi dari industri sawit atau bahkan SDA tersebut tidak ada lagi,” ujar Zia.

Disisi lain, kekerasan berbasis gender terus meningkat. Sinergi data Kementerian PPPA, Komnas Perempuan mencatat **35.533 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2024, meningkat 2,4%** dari tahun sebelumnya, dan **290 kasus femisida**, menunjukkan pola kekerasan ekstrem yang berulang dan semakin brutal. Namun statistik ini belum mencatat kekerasan ekologis yang dialami perempuan akibat perampasan tanah dan kerusakan lingkungan.

Ija Syahrini, Koordinator Nasional FAMM Indonesia menyebutkan kekerasan terhadap perempuan tidak berdiri sendiri, ia terhubung dengan arah pembangunan negara yang semakin bergantung pada ekstraktivisme dan industri yang menggerus hutan, menghancurkan ruang hidup, serta memperdalam ketimpangan gender. Negara memegang tanggung jawab utama untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan kerusakan ekologis yang mengancam masa depan generasi.

“Pada penutupan 16 HAKTP 2025 ini, kami menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diakhiri tanpa menghentikan kerusakan lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Dari Sumatera hingga Papua, kami memperingati 16 HAKTP dengan selalu memberi ruang aman bagi perempuan dan mendobrak kebebasan perempuan yang semakin gagal diperjuangkan oleh pemerintah,” kata Ija.

Lebih lanjut, dalam acara ini Kaoem Telapak mengambil peran dalam pergelaran pameran yang menggambarkan seperti apa wujud hutan yang sehat, praktik penghidupan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan keanekaragaman hayatinya, dan kontras dengan adanya ancaman deforestasi. **Olvy Tumbelaka, Pengurus Kaoem Telapak** mengatakan pameran tersebut memvisualisasikan dampak serta bagaimana Perempuan di wilayah adat dan komunitas lokal terus berada di garis depan dalam mempertahankan wilayah kelola mereka.

“Foto-foto pameran ini menggambarkan perjalanan kampanye dan advokasi Kaoem Telapak, sekaligus mengingatkan bahwa keindahan biodiversitas Indonesia, termasuk orangutan, bekantan, dan burung-burung khas bisa saja hilang dalam waktu dekat,” ucap Olvy.

“Perempuan di wilayah adat dan komunitas lokal selama ini menjaga keutuhan ruang hidup berupa alam dan hutan yang lestari. Karena itu, ketika membicarakan hubungan alam dan 16 HAKTP, pertanyaannya adalah bagaimana perempuan bisa terus bergantung pada alam jika ruang hidupnya diambil alih oleh negara maupun korporasi besar,” tutupnya.

-Selesai-

Narahubung: FAMM Indonesia (IS - 0813-4354-9994) & Kaoem Telapak (SR-0821-1247-4343)